

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Transformasi digital menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui integrasi sistem informasi yang mampu mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan data dan keuangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaporan keuangan secara terintegrasi. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Transformasi digital dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah menjadi kebutuhan yang mendesak karena masih banyak instansi pemerintah yang menghadapi kendala administratif dalam proses pelaporan keuangan, khususnya dalam pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) (Lestari *et al.*, 2024). SPJ merupakan dokumen penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan. Ketepatan penyusunan SPJ sangat mempengaruhi proses pencairan anggaran, realisasi kegiatan, serta akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan SPJ di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi berbagai kendala administratif, seperti keterlambatan pelaporan, revisi dokumen yang berulang, ketidaksesuaian data, kesulitan pelacakan arsip, serta proses verifikasi yang memerlukan waktu cukup lama. Permasalahan tersebut menyebabkan proses administrasi menjadi tidak efektif dan berpotensi menghambat pencairan anggaran kegiatan. Ketika SPJ belum selesai diverifikasi secara lengkap, maka proses realisasi anggaran tidak dapat segera dicairkan sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dinas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan SPJ tidak hanya berkaitan dengan administrasi dokumen semata, tetapi juga berhubungan langsung dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Keterlambatan penyelesaian SPJ dapat menyebabkan kegiatan operasional menjadi terhambat, penyerapan anggaran menjadi lambat, serta menurunkan efektivitas pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dalam merancang program

pengawasan, menyusun kebijakan serta memberikan dukungan teknis pengawasan, melakukan audit, investigasi, verifikasi, dan penilaian atas pelaksanaan fungsi pengawasan di daerah (Nurfadillah *et al.*, 2022). Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian keuangan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang menghadapi tantangan dalam pengelolaan administrasi, khususnya dalam pengelolaan SPJ.

Berdasarkan hasil observasi awal, proses pengelolaan SPJ di bagian Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang masih menghadapi berbagai kendala administratif, seperti penginputan data yang dilakukan secara berulang, proses verifikasi dokumen yang memerlukan waktu lama, keterlambatan pengumpulan bukti pendukung kegiatan, serta kesulitan dalam pelacakan dokumen arsip. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelesaian SPJ menjadi lambat dan berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran kegiatan. Pengelolaan SPJ secara konvensional seringkali menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan dalam pengarsipan, keterlambatan pelaporan, dan potensi kesalahan dalam pencatatan data (Fauzi, 2025).

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya transformasi digital dalam pengelolaan SPJ guna meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi SPJ diharapkan mampu mengintegrasikan proses administrasi keuangan ke dalam satu sistem yang lebih efektif, sehingga dapat mempermudah proses input data, mempercepat verifikasi dokumen, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta mempermudah proses monitoring realisasi anggaran.

Penelitian Setiyawan *et al.*, (2025) telah mengkaji implementasi SPJ berbasis teknologi dengan metode *Agile Software Development* yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif dan kolaboratif antara tim pengembang dan pengguna sistem. Penelitian Burjulus *et al.*, (2023) juga mengembangkan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan SPJ di Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas menggunakan metode *prototyping* dengan PHP dan *MySQL* yang bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaporan SPJ secara digital. Namun, kajian tersebut masih memiliki keterbatasan pada fleksibilitas sistem dalam pengelolaan data. Celah tersebut dikembangkan melalui penggunaan *Framework CodeIgniter* 3.1.13 dan database *MySQL*, yang lebih terstruktur dan efisien dalam mendukung transparansi, akurasi, serta efisiensi pencatatan dan pelaporan SPJ.

Fauzi (2025) mengungkapkan bahwa penggunaan *Google Form* dan *Google Sheets* dalam pengelolaan SPJ di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan efisiensi administrasi, meskipun terdapat tantangan dalam adaptasi teknologi dan kompetensi pengguna. Sistem digital ini membantu mengatasi kendala dalam pengelolaan SPJ konvensional seperti kesulitan pengarsipan dan keterlambatan pelaporan. Asqia & Nabarian, (2021) mengungkapkan implementasi SPJ menggunakan *Google Form* dan *Google Sheets* berbasis *Cloud* dapat diakses siapapun tanpa terbatas tempat dan waktu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah *electronic Service Quality* (E-SQ) dan *User Acceptance Test* (UAT) sebagai pengujiannya.

Fernanda (2024) membahas implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI) yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (SPAN). SAKTI memudahkan proses akuntansi berbasis akrual dan integrasi data keuangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah. Suroiyah *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa penguasaan digitalisasi oleh pemerintah desa berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Digitalisasi memungkinkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mempermudah pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait. Tarigan *et al.*, (2025) mengungkapkan bahwa implementasi SIPD dan *e-SPJ* membawa pengaruh positif terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Amplas.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi SPJ pada instansi pemerintah, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada implementasi sistem yang telah berjalan serta pengembangan aplikasi dari sisi teknis, tanpa mengkaji secara mendalam proses perancangan sistem dalam konteks lembaga pengawasan internal daerah. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji aspek kesiapan organisasi serta dampak kualitatif digitalisasi SPJ terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas di lingkungan Inspektorat Daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Penelitian ini memfokuskan pada analisis proses pengelolaan SPJ serta mengkaji penerapan rancangan digitalisasi SPJ dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan proses

administrasi keuangan dari sistem manual menuju sistem digital serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan SPJ di Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana penerapan rancangan digitalisasi SPJ dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan?
3. Bagaimana penerapan rancangan digitalisasi SPJ dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses pengelolaan SPJ di Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
2. Menganalisis penerapan rancangan digitalisasi SPJ dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi keuangan.
3. Menganalisis penerapan rancangan digitalisasi SPJ dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan mengenai digitalisasi administrasi keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Penelitian ini menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber acuan bagi akademisi dalam mengkaji pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan tata kelola dan pengawasan internal di sektor publik.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam mengembangkan strategi digitalisasi SPJ yang efektif dan efisien. Sistem yang dirancang melalui penelitian ini dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan pencatatan manual yang selama ini menimbulkan keterlambatan, kesalahan input, dan kesulitan pelacakan dokumen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai mengenai pentingnya adaptasi teknologi dalam proses kerja, serta menjadi model awal bagi instansi pemerintah lain yang ingin menerapkan digitalisasi dalam pelaporan keuangan.